

Dua Anggota DPR Tersangka

Dugaan Korupsi Bansos KONI

Pontianak, BERKAT.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bakal menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos

KONI Kalbar 2006-2008. Keduanya anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Zulfaidhi dan Usman Ja'far. Kini penyidik sedang mengumpulkan kelengkapan alat buktinya.

Kapal alat bukti guna penetapan status keduanya. "Ya (Zulfaidhi dan UJ). Tapi kita akan lengkapi pemeriksaan untuk melengkapi dua alat bukti. Kalau semua sudah cukup maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal

Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Wildhan Dhani, Rabu (27/6) di Pontianak. Penyidik Polda Kalbar sendiri sudah melakukan gelar perkara pada 19 Juni lalu untuk menentukan tersangka tambahan dalam kasus Bansos KONI. Sementara
LANJUTAN BACA HAL 11

tersangka yang sudah ditetapkan masih tetap satu orang. Yakni mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Kini berkas perkara kasusnya sudah diimpahkan ke Kejaksaan. Namun polisi belum mendapatkan petunjuk atas berkas yang telah disampaikan.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi dana Bansos itu, sesuai hasil perhitungan kerugian negara BPK RI perwakilan Kalbar mencapai Rp 15,24 miliar. Tersangka dalam kasus tersebut, menurut Direskrim Sus, dipastikan bakal bertambah. Hanya saja masih dibutuhkan kelengkapan alat buktinya.

Dalam pengusutan dugaan korupsi dana Bansos, Polda Kalbar tidak hanya sebatas menyelidiki dana bantuan kepada KONI. Tetapi juga Bansos untuk dewan pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyelidikannya, Polda menemukan dari total dana bantuan Pemprov ke Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Rp 25 miliar ditemukan penyalahgunaan dana Rp 5 miliar. Dipinjankan ke Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2004-2009, melalui Sekda. Kendati demikian, penyidik telah berhasil melacak penyitaan dana Rp 5 miliar yang dipinjam tersebut.

Direskrim Sus menambahkan, jika dua anggota DPR RI sudah ditetapkan menjadi tersangka maka untuk pemertsaannya dibutuhkan izin Presiden. Karena status keduanya adalah pejabat negara. "Kalau dulu (Zulfaidhi dan UJ) sudah pernah diminta keterangan. Tapi kapasitas mereka masih sebagai saksi. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka maka surat izin ke Presiden akan kembali diajukan melalui koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri," jelas Direskrim Sus.

Mencuatnya kasus bansos KONI bermula dari hasil audit regular yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk audit dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO) terhadap laporan keuangan tersebut. Penyebab DO dikarenakan BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Dari hasil penelitian PDDT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK pusat. Hasilnya ditemukan empat item penggunaan bansos bermasalah. Keempat item itu, temuan dana bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Uangnya digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp 1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Serta yang terakhir ada keteroran kas KONI Kalbar tahun 2009 dan terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,11 miliar. (del)

BERKAT
BERITAKHATULISTIWA

Kamis, 28 Juni 2012